

## Dinamika Pendidikan Islam Pada Masa Penjajahan Belanda dan Jepang

Wahyu Aji<sup>1</sup>, Bahaking Rama<sup>2</sup>, Syamsuddin<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>UIN Alauddin Makasar

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received December 17, 2024

Revised December 19, 2024

Accepted December 29, 2024

Available online 9 January, 2025

#### Keywords:

Pendidikan Islam, Penjajahan Belanda,  
Penjajahan Jepang.

#### Keywords:

Islamic education, Dutch Colonialization,  
Japanese Colonialization



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2024 by Author. Published by  
Yayasan Daarul Huda

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dinamika pendidikan Islam dalam konteks masa penjajahan Belanda dan Jepang. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif berupa kajian literatur (literature research) dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa buku dan jurnal. Hasil penelitian ini adalah bahwa pendidikan Islam pada masa penjajahan Belanda dideskripsikan dengan keadaan dikotomis (pembedaan berdasarkan penyelenggaranya yakni swadaya masyarakat atau pemerintah Belanda dan diskriminatif (perlakuan berbeda antara lembaga pendidikan swadaya dengan lembaga pendidikan kolonial). Adapun pendidikan Islam pada masa penjajahan Jepang dideskripsikan sebagai babak cerah karena pemerintah Jepang mengaktifkan kembali madrasah yang ditutup oleh pemerintah Belanda dan memberikannya banyak bantuan dan dukungan dalam berbagai bentuk untuk kemajuan madrasah dan menyatakannya dengan sekolah negeri meskipun akhirnya terbaca sebagai “kedok” saja.

### ABSTRACT

This research aims to examine the dynamics of Islamic education in the context of the Dutch and Japanese colonial periods. The type of research is qualitative in the form of literature research using data collection techniques from the books and journals. The results of this research are

that Islamic education during the Dutch colonial period is described in a dichotomous state (distinction based on its organizers, namely non-governmental organizations or the Dutch government and discriminatory (different treatment between self-supporting educational institutions and colonial educational institutions). Meanwhile, Islamic education during the Japanese colonial period is described as a process bright because the Japanese government reactivated the madrasah which was closed by the Dutch government and gave it a lot of assistance and support in various forms for the progress of the madrasah and made it equal with public schools even though in the end it was read as just a “mask”.

### PENDAHULUAN

Manusia terlahir dalam keadaan fitrah, baik raga, jiwa maupun pikirannya. Semua hal-hal baik dan hal-hal buruk yang melekat padanya masih dalam bentuk potensi. Perlu stimulus dan proses berbingkai waktu untuk menjadikan potensi kebaikan menjadi karakter baik dan potensi keburukan menjadi tak muncul dalam kepribadiannya. Stimulus dan proses tersebut terakumulasi dalam konsep dan aplikasi pendidikan.

Salah satu dimensi penting dalam realisasi konsep-konsep pendidikan adalah waktu, yang dengannya proses pendidikan dapat terealisasi secara progressif dan terukur. Waktu jugalah yang menjadi tolak ukur perkembangan dan dinamika suatu konsep pendidikan dari masa ke masa. Itulah sebabnya, dalam pendidikan Islam, sejarah pendidikan Islam menjadi salah satu bagian yang dikaji secara mendalam.

Sejarah pendidikan Islam secara esensial bekerja dengan mendeskripsikan sekaligus menganalisis korelasi antara peristiwa yang terjadi pada masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang sehingga hadirilah *falsafah tiga dimensi waktu* dengan berusaha mengetengahkan *ibrah* dan *i'tibar* dari ungkapan deskripsi sejarah lalu ditemukan hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya untuk dipilah hal-hal baik yang dapat dicontoh dan hal-hal buruk yang cukup untuk menjadi pembelajaran saja.<sup>1</sup>

Raya (2018) yang mengkaji orientasi pendidikan Islam pada masa penjajahan hingga Orde Baru menemukan bahwa pesantren sebagai representasi pendidikan Islam pada masa penjajahan Belanda “dianaktirikan” dengan sekolah kolonial yang didirikan pemerintah Belanda.<sup>2</sup> Adapun pendidikan Islam

<sup>1</sup> Haidar Putra Daulay, *Kajian dari Zaman Pertumbuhan Sampai Kebangkitan*, 3 ed. (Prenadamedia, 2016).

<sup>2</sup> Moch. Khafids Fuad Raya, “Sejarah Orientasi Pendidikan Islam Di Indonesia (Dari Masa Kolonial Hingga Orde Baru),” *Jurnal Pendidikan Islam*, 08.2 (2018), hal. 223–34 <<https://doaj.org/article/1e8aebf063e94d09a7eb93f04cf4b8fd>>.

pada masa penjajahan Jepang dideskripsikan oleh Hudaidah (2021) sebagai masa reformasi sistem kurikulum dalam berbagai jenis dan jenjang pendidikan di Indonesia.<sup>3</sup>

Dalam konteks Indonesia, sejarah pendidikan Islam dikatakan cukup dinamis seiring dengan sejarah dan perkembangan Indonesia sebagai sebuah bangsa dan sebuah negara yang memperoleh kemerdekaannya melalui perjuangan dalam peperangan melawan penjajah. Dengan demikian, salah satu yang menjadi urgen untuk dikaji adalah dinamika pendidikan Islam pada masa penjajahan Belanda dan Jepang.

## METODE PENELITIAN

Dengan mengaplikasikan pendekatan literatur (*research literatur*), penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan membaca dan mendokumentasikan hasil bacaan yang kemudian dicatat dan diolah menjadi bahan penelitian. Selain itu, peneliti juga menelaah dan mengkaji beberapa jurnal terdahulu yang relevan serta buku-buku dalam bentuk cetak maupun elektronik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam konteks Indonesia, sejarah pendidikan Islam dimulai sejak abad 12 Masehi. Pada masa itu, umat Islam merupakan pilar pembawa perubahan besar dalam dunia pendidikan terutama oleh pelajar muslim yang belajar hingga ke Makkah dan ke negara-negara lainnya.<sup>4</sup> Masuknya Belanda dan Jepang secara bergantian sebagai penjajah ke Indonesia memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kondisi sosial masyarakat pada saat itu termasuk dalam konteks pendidikan Islam.

### 1. Pendidikan Islam pada masa penjajahan Belanda

Penjajahan Belanda di Indonesia berlangsung sejak kedatangan VOC (*Vereenigde Oostindische Compagnie*) pada awal abad ke-17 yakni tahun 1602 hingga berakhirnya kekuasaan kolonial Belanda sekitar tahun 1942. Pada masa itu pendidikan Islam mengalami tantangan yang cukup signifikan, terutama karena kebijakan pemerintah kolonial Belanda yang membatasi peran lembaga pendidikan, terutama lembaga pendidikan Islam agar tidak menjadi ancaman bagi keberlangsungan pemerintahan kolonial Belanda.

Belanda menyadari bahwa mayoritas bangsa Indonesia beragama Islam dengan kesadaran akan pentingnya mempelajari dan mengajarkan agama cukup tinggi di kalangan masyarakat. Hal itu membuat Belanda khawatir akan muncul inspirasi dan semangat antipenjajahan sehingga berpotensi menyulitkan penjajahan Belanda terhadap Indonesia. Akhirnya Belanda, melalui ide dari Snouck Hurgronje memformulasikan pendidikan Barat untuk diterapkan di Indonesia. Saat itu sekitar akhir abad 19 itulah perkembangan pendidikan Islam diidentifikasi dengan fenomena persaingan antara pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam yang paling signifikan dan diselenggarakan secara swadaya oleh masyarakat Indonesia dengan lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah kolonial Belanda dengan menggunakan kurikulum, metode, sarana, dan sebagainya yang mengadopsi konsep dari Barat.<sup>5</sup>

Terdapat dua ciri utama pendidikan Islam di masa penjajahan Belanda yaitu *dikotomis* (pembedaan antara pendidikan Islam yang diselenggarakan secara swadaya oleh masyarakat Indonesia dengan pendidikan Barat yang diselenggarakan oleh Belanda) dan *diskriminatif* (perlakuan berbeda terhadap lembaga pendidikan Islam dengan lembaga pendidikan kolonial Belanda)<sup>6</sup>

Fenomena dikotomis dan diskriminatif yang dimaksudkan adalah sebagai berikut.

#### a. Dikotomis

Pemerintah kolonial Belanda membedakan bahkan mempertentangkan lembaga pendidikan Belanda dengan lembaga pendidikan Islam. Lembaga pendidikan Belanda seperti HIS (*Holland Inladse School*), MULO (*Meer Uit gebreid lager school*), AMS (*Algemene Middelbare School*), dan lain-lain diidentifikasi sebagai lembaga pendidikan resmi yang menyelenggarakan pendidikan dengan mengembangkan ilmu-ilmu umum atau ilmu-ilmu sekuler yang bersumber dari Barat. Bahkan mereka tidak mengajarkan pendidikan agama sama sekali karena berpendapat bahwa agama adalah urusan pribadi.

<sup>3</sup> Hudaidah Hudaidah dan M Arman Putra Karwana, "Pendidikan Di Indonesia Masa Pendudukan Jepang," *Danadyaksa Historica*, 1.2 (2022), hal. 97, doi:10.32502/jdh.v1i2.4243.

<sup>4</sup> Agustang, Bahaking Rama, dan Muhammad Yahdi, "Pendidikan Islam Masa Penjajahan Kemerdekaan dan Dinamika Kebijaksanaan," *PIJAR: Jurnal Pendidikan dan Pengajaran*, 1.3 (2023), hal. 240–57, doi:10.58540/pijar.v1i3.357.

<sup>5</sup> Khusnan Iskandar dan Ahmad Syahrul Ansori, "Pendidikan Islam Masa Pra Kemerdekaan; Telaah Kebijakan Pendidikan Islam Masa Penjajahan," *Journal of Education and Religious Studies*, 2.02 (2022), hal. 45–52, doi:10.57060/jers.v2i02.61.

<sup>6</sup> Agustang, Bahaking Rama, dan Muhammad Yahdi.

Pada sisi lain, lembaga pendidikan Islam seperti pesantren, Dayah, Surau, dan sebagainya diidentifikasi sebagai lembaga pendidikan yang khusus menyelenggarakan pendidikan agama Islam yang bersumber dari kitab-kitab klasik.

b. Diskriminatif

Selain mendikotomisasi, pemerintah kolonial Belanda juga melakukan diskriminasi dalam dunia pendidikan kala itu dengan memberikan perlakuan berbeda antara lembaga pendidikan berorientasi Barat yang diselenggarakannya dengan lembaga pendidikan Islam. Diskriminasi yang tampak jelas antara lain *membedakan bahasa pengantar pendidikan* (bahasa Belanda untuk pendidikan Belanda dan bahasa Melayu untuk pendidikan pribumi) dan *membentuk badan pengawas khusus untuk mengawasi lembaga pendidikan Islam*.<sup>7</sup> Lembaga pengawas itu salah satu programnya adalah mewajibkan guru agama untuk memiliki izin resmi dari pemerintahan Belanda sebelum mengajar agar dapat dikontrol isi pengajarannya dan mencegah penyebaran isu-isu subversif.

Meskipun demikian, pada akhirnya pemerintah kolonial Belanda harus menerima kenyataan bahwa kehadiran lembaga pendidikan yang diselenggarakannya tidak dapat menggerus eksistensi lembaga pendidikan Islam yang diselenggarakan secara swadaya oleh masyarakat Indonesia, terutama pesantren. Justru Pesantren semakin berkembang karena mengadopsi sistem pendidikan Barat yang diperkenalkan oleh Belanda sehingga terjadi modernisasi dalam lembaga pendidikan Islam secara umum dengan tanpa menanggalkan ideologi dan identitas keislamannya.

2. Pendidikan Islam pada masa penjajahan Jepang

Penjajahan Jepang di Indonesia sebenarnya singkat saja, sekitar 3,5 tahun, yang berawal pada 8 Maret 1942 dan berakhir pada Agustus 1945. Namun demikian, durasi yang hanya sebentar itu ternyata cukup signifikan dalam mewarnai konstalasi kehidupan bernegara dan berbangsa, terutama perihal infrastruktur, ekonomi, politik, sosial, dan pendidikan.

Pada awalnya kedatangan Jepang ke Nusantara disambut dengan baik oleh rakyat Indonesia karena mereka membawa semangat memerdekakan dan membebaskan Nusantara dari cengkraman penjajahan Belanda dengan menawarkan *tagline* sebagai “saudara tua”. Strategi untuk mendapatkan simpati dari rakyat Indonesia ini rupanya berhasil untuk sementara waktu, terbukti dengan sambutan meriah rakyat Indonesia sampai mereka dengan sukarela mengibarkan bendera Indonesia dan bendera Jepang secara berdampingan.<sup>8</sup>

Pidato salah seorang petinggi Jepang di pulau Jawa, Letnan Jendral Imamura di hadapan para ulama yang menegaskan bahwa Jepang memiliki tujuan untuk menghormati dan melindungi Islam secara umum memberikan pengaruh terhadap kebijakan pendidikan Islam. Apalagi setelah Jepang menawarkan bantuan dan bagi madrasah serta membolehkan diaktifkannya kembali madrasah-madrasah yang ditutup oleh pemerintah kolonial Belanda.

Namun perlahan umat Islam mulai merasakan kekecewaan karena rupanya kebijakan tersebut hanya sebagai kedok untuk menarik simpati masyarakat Indonesia, terutama dalam kepentingannya pada Perang Dunia II. Tekanan yang dialami oleh Jepang akhirnya membuat mereka menampakkan tabiat aslinya. Ternyata Jepang jauh lebih kejam dari penjajah Belanda dengan memaksa rakyat bergabung pada badan pertahanan Jepang dan mengabaikan pendidikan rakyat.

Kendati demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa kebijakan-kebijakan awal Jepang sebagai pembelaan kepentingan umat Islam memberikan hal positif yang cukup menguntungkan, antara lain.

- 1) Pengakuan secara legal formal terhadap Sekolah Tinggi Islam yang didirikan oleh KH. Wahid Hasyim, Kahar Muzakkar dan Bung Hatta yang berkedudukan di Jakarta.
- 2) Kunjungan yang intensif oleh Jepang ke lembaga-lembaga pendidikan Islam (pesantren, madrasah, sekolah) untuk memberikan bantuan yang berefek pula pada perbaikan kurikulum.
- 3) Pelajaran budi pekerti ditetapkan untuk diajarkan di sekolah-sekolah.
- 4) Penyelenggaraan pendidikan untuk calon guru dengan berbagai jenjangnya.
- 5) Penyelenggaraan sistem pendidikan yang sistematis (sekolah berjenjang dari pendidikan dasar, pendidikan menengah pertama, pendidikan menengah kedua, dan sekolah kejuruan).
- 6) Penyatuan dualisme kurikulum yang ditinggalkan Belanda (kurikulum Barat dan kurikulum pribumi/Islam) menjadi Sekolah Rakyat.
- 7) Bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi di sekolah.<sup>9</sup>

Setelah Jepang meninggalkan Indonesia berdasarkan Perjanjian Linggarjati, masyarakat Indonesia masih meneruskan beberapa hal-hal baik dalam pendidikan Islam yang formulasinya diawali oleh Jepang dan meninggal hal-hal buruk yang tidak layak lagi untuk diteruskan.

<sup>7</sup> Agustang, Bahaking Rama, dan Muhammad Yahdi.

<sup>8</sup> Miftahur Rohman, “Kebijakan Pendidikan Islam Masa Penjajahan Jepang,” *Al-Hikmah: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 02. Kebijakan Pendidikan Islam (2018), hal. 17–18.

<sup>9</sup> Iskandar dan Ansori.

## SIMPULAN

Sejarah pendidikan Islam di masa penjajahan Belanda dan Jepang memberikan gambaran yang jelas mengenai dinamika dunia pendidikan Islam yang dipengaruhi oleh kondisi politik dan sosial pada masa itu.

Pada satu sisi, penjajahan Belanda berhasil mendatangkan warna baru dalam dunia pendidikan Islam dengan mendatangkan konsep pembandingan yakni pendidikan Barat meskipun saat itu diselenggarakan secara dikotomis dan diskriminatif. Pada sisi lain, Jepang memberikan nuansa baru melalui kebijakan menyatukan dua konsep pendidikan (Islam dan Barat) meskipun diselenggarakan secara pragmatis untuk kepentingan Jepang itu sendiri.

## SARAN

Penting bagi generasi muda untuk mempelajari sejarah pendidikan Islam agar dapat memahami perjuangan umat Islam dalam mempertahankan nilai-nilai agama di tengah tantangan zaman.

## REFERENSI

- Agustang, Bahaking Rama, dan Muhammad Yahdi, "Pendidikan Islam Masa Penjajahan Kemerdekaan dan Dinamika Kebijaksanaan," *PIJAR: Jurnal Pendidikan dan Pengajaran*, 1.3 (2023), hal. 240–57, doi:10.58540/pijar.v1i3.357
- Daulay, Haidar Putra, *Kajian dari Zaman Pertumbuhan Sampai Kebangkitan*, 3 ed. (Prenadamedia, 2016)
- Hudaidah, Hudaidah, dan M Arman Putra Karwana, "Pendidikan Di Indonesia Masa Pendudukan Jepang," *Danadyaksa Historica*, 1.2 (2022), hal. 97, doi:10.32502/jdh.v1i2.4243
- Iskandar, Khusnan, dan Ahmad Syahrul Ansori, "Pendidikan Islam Masa Pra Kemerdekaan; Telaah Kebijakan Pendidikan Islam Masa Penjajahan," *Journal of Education and Religious Studies*, 2.02 (2022), hal. 45–52, doi:10.57060/jers.v2i02.61
- Raya, Moch. Khafids Fuad, "Sejarah Orientasi Pendidikan Islam Di Indonesia (Dari Masa Kolonial Hingga Orde Baru)," *Jurnal Pendidikan Islam*, 08.2 (2018), hal. 223–34 <<https://doaj.org/article/1e8aebf063e94d09a7eb93f04cf4b8fd>>
- Rohman, Miftahur, "Kebijakan Pendidikan Islam Masa Penjajahan Jepang," *Al-Hikmah: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 02. Kebijakan Pendidikan Islam (2018), hal. 17–18